KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK DALAM KEBUTUHAN ENERGI MINYAK DI SUDAN MELALUI *CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION* (CNPC) TAHUN 2011-2014

Arief Munandar

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)

Email: rhiefmunandar@gmail.com

Abstract

This research is motivated by Tiongkok foreign policy for Sudan by issuing foreign policy strategy Go Out Policy and Good Neighbor or Peripheral Diplomacy through China Petroleum National Corporation (CNPC). This study aims to find out how Tiongkok foreign policy in the energy needs of oil in Sudan through China National Petroleum Corporation (CNPC) in 2011-2014. The research method is qualitative research method. Data were collected by conducting literature / literature study as well as website search. The study was conducted at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Theories used are foreign policy theory, foreign policy, national interest, diplomacy, conflict theory, energy security concept. The results of this study indicate that the policy carried out through China National Petroleum Corporation (CNPC) in 2011-2014 is the policy of Go Out Policy and Good Neighbor or Peripheral Diplomacy to establish cooperation and diplomacy in Sudan. China's dependence on Sudan is because Sudan has 3 trillion cubic reserves of gas, a larger oil exploration block and quality Sudanese oil, China's oil demand increased from 346.6 million tons in 2006 and 407 million tons in 2010 and is forecast by 2020 to reach 10 , 5 million barrels per day.

Keyword: *Foreign Policy, CNPC, Energy Oil, Sudan*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kebijakan luar negeri Tiongkok untuk Sudan dengan cara mengeluarkan strategi kebijakan luar negeri *Go Out Policy* dan *Good Neighbor or Peripheral Diplomacy* melalui *China Petroleum National Corporation* (CNPC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kebutuhan energi minyak di Sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan studi literatur/studi pustaka serta penelusuran *website*. Penelitian dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Teori yang digunakan yaitu teori politik luar negeri, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, diplomasi, teori konflik, konsep *energy security*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014 yaitu kebijakan *Go Out Policy* dan *Good Neighbor or Peripheral Diplomacy* untuk menjalin kerjasama dan diplomasi di Sudan. Ketergantungan Tiongkok terhadap Sudan dikarenakan Sudan memiliki cadangan gas 3 trilliun kubik, blok eksplorasi minyak lebih luas dan minyak Sudan yang berkualitas, kebutuhan minyak Tiongkok meningkat dari 346,6 juta ton pada 2006 dan 407 juta ton di tahun 2010 dan diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 10,5 juta barel per hari.

Kata kunci: Kebijakan luar negeri, CNPC, Energi Minyak, Sudan

BAB 1 LATAR BELAKANG MASALAH

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tiongkok merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia serta pertumbuhan ekonominya yang tumbuh dengan sangat pesat. Dibawah pemerintahan Hu Jintao, Tiongkok menekankan kebijakan luar negeri dengan menunjukkan bahwa Tiongkok terbuka untuk bekerjasama dengan negara manapun karena hanya dengan kerjasama setiap negara bisa menciptakan perdamaian. Pada dimensi ketersediaan energi yang cukup, permintaan Tiongkok terhadap energi sangat tinggi. Namun, tingginya permintaan minyak ini tidak dapat dipenuhi oleh Tiongkok melalui pasokan energi domestiknya. Oleh karena itu, memaksa Tiongkok untuk mencari persediaan energinya yang cukup.

Namun, tempat ekspansi Tiongkok dalam mencari kebutuhan suplai minyaknya rawan konflik. Konflik tersebut mampu mempengaruhi suplai energi Tiongkok dan keamanan distribusi hasil produksi minyak tersebut untuk dikirim ke Tiongkok. faktor-faktor ini yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengamankan suplai energinya baik dalam mengamankan persediaan energinya maupun tetap menjaga keamanan distrbusinya. Untuk mengatasi permasalahan ketidakamanan energinya, Tiongkok melakukan ekspansi ke negara-negara Afrika yang notabenenya negara yang memiliki sumber daya alam (Medeiros, 2009:2-4).

Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Go Out Policy* dengan tujuan untuk mendorong perusahaan minyak nasionalnya untuk mengikuti jejak perusahaan-perusahaan minyak internasional dalam rangka mendapatkan cadangan minyak serta untuk mendapatkan pendapatan dari sektor hulu (eksplorasi dan produksi). Dalam kebijakan *Go Out Policy* ini mengemukakan sedikit tentang isi kebijakanya dengan cara menggunakan strategi kebijakannya dan fungsinya sebagai perusahaan minyak energi Tiongkok yaitu meningkatkan sumber dengan berusaha untuk memaksimalkan dan disversifikasi sumber daya minyak dan gas, memastikan pengganti tertib cadangan, dan mempertahankan kepemimpinan dari bisnis CNPC dari hulu ke hilir. *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi distribusi minyak Tiongkok dari kegiatan eksplorasi di negara lain. Setelah dikeluarkannnya kebijakan *Go Out Policy*, Perusahaan minyak nasionalnya. *China National Petroleum Corporation* (CNPC) pada saat ini memiliki aset minyak utama di Sudan dengan menguasai sektor industri energi di negara tersebut. Selain itu, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di Tiongkok dan pemasok kebutuhan suplai minyak dan bisnis meliputi minyak dan gas operasi, layanan teknis, rekayasa dan konstruksi, manufaktur peralatan, keuangan layanan dan pengembangan energi terbarukan. Saat ini, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki investasi minyak dan gas di 29 negara dan menyediakan layanan ladang minyak di lebih dari 50 negara dan wilayah di seluruh dunia. Seluruh tujuan investasi Tiongkok di negara-negara Afrika bertujuan untuk mendapatkan akses aman terhadap suplai energinya.

Ketika AS menarik investasinya di Sudan dan embargo agar negara-negara Barat tidak ada yang berinvestasi di Sudan sejak itu Sudan merasa khawatir negara seperti Tiongkok akan menarik investasinya di Sudan yang nanti berdapkak kepada kedua negara. pada tahun 2011 ekspor minyak kedua Sudan untuk Tiongkok hanya sekitar 66%. Namun, setelah dilakukannya hubungan diplomatik di kedua Sudan, ekspor minyak kedua Sudan untuk Tiongkok telah mengalami peningkatan sekitar 80% pada tahun 2012 dan 86% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan Tiongkok telah menjadi mitra utama dalam minyak kedua Sudan dan tidak menutup kemungkinan seluruh hasil produksi minyak kedua Sudan dapat diekspor ke Tiongkok (http://csr.cnpc.com.cn/csr/xhtml/PageAssets/CNPCinSudan.pdf Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Alasan mengapa Tiongkok memilih Sudan sebagai salah satu mitra utama dalam minyak ini, Tiongkok melihat Sudan merupakan

daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti memiliki cadangan gas sekitar 3 trilliun kubik, blok eksplorasi minyak yang lebih luas, hasil produk minyak Sudan sangat berkualitas karena rendah sulfur dan timbal yang sesuai dengan fasilitas penyulingan yang dibangun oleh Tiongkok. Selain itu, Tiongkok memilih Sudan juga dikarenakan cadangan energi yang dimiliki oleh Sudan sekitar 6,7 milliar Barrel dan diyakini memiliki cadangan minyak yang belum diekploitasi. Di kedua Sudan, Tiongkok mendapatkan minyak dengan sangat mudah melalui pendekatan yang dilakukan Tiongkok dengan kedua pemerintah Sudan. Namun Tiongkok hanya memakai suplai minyak dari kedua Sudan untuk pemenuhan ketersediaan energinya hanya sekitar 5-7% sepanjang tahun 2011-2014.

1.1 Rumusan Masalah

1.1.1 Rumusan Masalah Mayor

Dalam penelitian ini penelitian mengajukan pertanyaan mayor yaitu "Bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kebutuhan energi minyak di Sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014?

1.1.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC)?
2. Sejauh mana ketergantungan Suplai minyak Tiongkok dari Sudan?
3. Bagaimana kebutuhan energi minyak Tiongkok dalam ketersediaan pasokan energi minyak Tiongkok di Sudan?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan suplai energi minyaknya di Sudan khususnya dengan melalui *China National Petroleum Corporation* (CPNC) periode yang akan diteliti dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dimana tahun 2011-2014 Tiongkok memulai kebutuhanya dalam kepentingan nasionalnya dan juga dalam kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh Hu Jintao serta menggunakan *China National Petroleum Corporation* (CPNC) sebagai aset Tiongkok untuk melakukan investasi minyak, gas eksplorasi, produksi, penyulingan, bahan kimia, gas alam, pipa, serta pemasaran dan perdagangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKAPEMIKIRAN

Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.Tujuandasarstudi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam area transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional." (Mas"oed, 2000:28).

Politik luar negeri adalah serangkaian keputusan-keputusan pemerintahan yang dilakukan atas nama negara yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di panggung internasional. Istilah luar (*foreign)* dalam politik luar negeri merujuk pada apapun yang berada diluar batas-batas negara tertentu dan istilah *policy* didefinisikan sebagai suatu petunjuk, pedoman, pembimbing pada tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan-tujuan negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:126).

Perilaku politik luar negeri yakni tindakan-tindakan yang dilakukan negara terhadap negara lain dan sebaliknya, sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri adalah faktor internasional, faktor dalam negeri dan faktor individu pembuat keputusan (Kegley dan Raymond, 2010:60-73).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan di suatu negara untuk menghadapi negara lain atau aktor politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dengan demikian kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakatnya, meski kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu juga ditentukan oleh siapa yang berkuasa dalam kurun waktu tersebut (Mas'oed, 1994:184).

Tujuan kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang di tulis oleh Dugis menjadi sebuah tindakan penting yang harus diambil guna menjaga hubungan negaranya dengan negara lain karena kebijakan luar negeri merupakan bentuk sikap negara tersebut untuk menunjukkan peran negara dalam sistem internasional yang dapat membuat negara-negara lain ingin melakukan kerjasama bila memiliki kesamaan tujuan. Kebijakan luar negeri juga digambarkan sebagai sebuah sikap yang mana dalam perspektif ini kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem yang keputusannya dirumuskan dan direncanakan untuk melakukan eksekusi (Dugis, 2007:41).

Dalam melakukan kerjasama kedua negara maupun lebih terdapat berbagai macam kepentingan di negaranya sendiri, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy yaitu: Kepentingan nasional (*national interest)* merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002 : 116).

Didalam melakukan hubungan kedua negara terdapat teori diplomasi dimana Diplomasi merupakan proses untuk melakukan komunikasi antar negara melalui jalur-jalur resmi perwakilan juga mengalami perubahan. Dengan meningkatnya peran aktor non state dalam hubungan internasional, diplomasi mengalami perubahan dari yang semula bersifat *state centric* menjadi bervariasi derajatnya. Dari *state centric* hingga yang berorientasi antar warga negara (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:139). Dengan adanya teori diplomasi kedua dengan mudah aktor-aktor internasional memnyelesaikan persoalan yang dialami.

Diplomasi terjadi maka telah terjadinya konflik mengakibatkan terjadinya diplomasi yang bertujuan untuk memnyelesaikan persoalan yang terjadi, teori konflik sendiri memilik arti bahwa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain (Pruitt dan Rubin, 2004:9).

Kondisi internal yang mempengaruhi suatu negara seperti halnya negara harus mencari kebutuhan suplai minyaknya ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Melalui kondisi internal tersebut, maka kebijakan luar negeri suatu negara akan bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu mencari suplai energinya ke negara lain untuk mendapatkan persediaan energinya yang cukup. Setelah mendapatkan persediaan energinya yang cukup, setiap negara yang tergantung pada impor akan tetap menjaga keamanan distribusi minyak dengan melakukan berbagai upaya melalui kebijakan luar negerinya (Maso'ed, 1990:68).

Perkembangan Industri Tiongkok terutama di bidang Otomotif, urbanisasi penduduk dari desa ke kota menyebabkan tingginya konsumsi bahan bakar cair. Sedangkan, produksi dalam negeri Tiongkok tidak mampu lagi untuk menekan besarnya penggunaan konsumsi energi. Permasalahan tersebut telah memaksa Tiongkok harus mencari suplai minyak ke negara lain. Selama ini, sumber utama minyak Tiongkok masih berasal dari negara–negara Arab namun Tiongkok melakukan diversifikasi rute impor. Hal ini bertujuan untuk tidak bergantung kepada satu produsen suplai minyak saja, maka dari itu Tiongkok mencoba untuk melakukan ekspansi ke negara–negara Afrika salah satunya yaitu Sudan. Hubungan Tiongkok dengan Sudan berlangsung semenjak Sudan menjual saham kepada perusahaan minyak tiongkok. Minyak Sudan dikelola oleh perusahaan Minyak Tiongkok yaitu *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan selama ini CNPC telah

mengelola beberapa blok eksplorasi minyak di Sudan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu proses berpikir yang dimulai dari data yang di kumpulkan lalu di ambil kesimpulan secara umum. Teknik peneliti dalam memilih informan dalam meneliti kasus peneliti yaitu peneliti memilih sumber informan berdasarkan dengan apa permasalahan dan tujuan penelitian dengan cara melalui wawancara dan dalam mengumpulkan data peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan, data online, wawancara, dan dokumen maupun berita. Studi pustaka yangdigunakan yaitu dengan jurnal, artikel dan internet yang menyangkut masalah peneliti.

Dalam mengkaji keabsahan data peneliti melakukan metode triangulasi agar dapat memudahkan peneliti, dalam mengkaji permasalahan tersebut peneliti melakukan beberapa studi lapangan ke Pusat Penelitian Politik LIPI**,** kedutaan Sudan untuk Indonesia.

Dalam waktu penelitian peneliti hingga terselesaikan dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

BAB IX HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Tiongkok

Negara ini merupakan negara yang terletak di bagian kawasan Asia Timur yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Dari segi budaya, negara Tiongkok ini sangat terkenal dengan peradaban kuni, baik yang berasal dari Dinasti Tsin, Dinasti Ming, dan Dinasti Han. Republik Rakyat Cina (RRC) yang beribu kota di kota Beijing ini merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di dunia. Negara Tiongkok merupakan negara yang sangat luas dan sebagai negara terluas keempat di dunia, setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Meningkatnya kebutuhan sumber energi minyak bumi untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya populasi yang sangat pesat mendorong Tiongkok untuk memperluas pencariannya akan alternatif sumber-sumber minyak bumi selain Rusia dan Timur Tengah. Faktor pendorong hal ini sangat gambling, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok yang stabil di angka 8-10% dalam kurun 2000-2010 membutuhkan suplai energi tanpa gangguan. Selain itu, stabilitas suplai energi merupakan kepentingan nasional Tiongkok yang utama, terlihat dari kekhawatiran mantan Presiden Hu Jintao yang ia sebut sebagai "*The Malacca Dilemma*", dependensi Tiongkok yang sangat tinggi terhadap jalur perdagangan laut Selat Malaka yang membawa 80% minyak impor dari Timur Tengah dan Afrika. Hal ini mendorong Tiongkok untuk mencari minyak bumi ke luar negeri, Tiongkok saat ini menjadi importir minyak terbesar di atas Amerika Serikat (Shaofeng. 2010:1-24).

4.1.1.1.1 Politik Luar Negeri Tiongkok

Seiring dengan konsep *harmonious society* yang dicanangkan oleh Presiden Hu Jintao, pemimpin Tiongkok ini juga ingin menyebarkan bentuk diplomasi Tiongkok yang baru yang selaras dengan konsep harmonisasi. Bentuk politik luar negeri Tiongkok pada masa Hu Jintao pada dasarnya memang tidak jauh dari konsep *harmonious society*, yaitu *harmonious world*. Secara keseluruhan, Tiongkok mengubah bentuk diplomasinya. Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, Tiongkok memasuki babak baru. Terjadi perubahan baik dari sistem politik maupun ekonomi, yang juga mempengaruhi bentuk politik luar negeri Tiongkok. Pada masa Deng, Tiongkok berusaha untuk terus (Rozanov. 2013:15-16).

4.1.1.1.2 Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Sudan

Kebijakan luar negeri Tiongkok terkait dengan proses pencarian dan sekurisasi energinya terdiri dari tiga elemen utama, yang terdiri dari: *great power diplomacy (great pheriperal diplomacy)*, *good neighbor or peripheral diplomacy (Loan For Oil Diplomacy)*, dan *go out policy*. Dari ketiga bentuk kebijakan luar negeri tersebut, Tiongkok melakukan dua strategi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan penjalinan hubungan baik dengan tetangga terdekat dan juga mengupayakan kerjasama yang baik

dalam bidang energi, sebagai suatu aplikasi dari pemenuhan kebutuhan nasional Tiongkok akan sumber daya energi Hubungan diplomatis yang dijalin Tiongkok dengan Negara tetangganya tidak hanya berfokus pada penjalinan hubungan diplomatis melainkan Tiongkok berusaha untuk turut membangun kerjasama ekonomi di antara negara- negara tetangganya, sebagai salah satu cara untuk mereduksi permasalahan perbatasan dan untuk meningkatkan kepercayaan antara masing- masing negara sehingga secara tidak langsung hubungan diplomatis ini membuka kesempatan yang baik pula bagi kerjasama ekonomi yang menguntungkan bagi semua pihak (Zhao, 2008:13).

4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kebijakan yang dikeluarkan Tiongkok melalui *China national Petrolem Corporation* (CNPC)

Pada fokus penelitian ini membahas mengenai suplai energi Tiongkok di Sudan melalui CNPC, oleh karena itu pada penelitian sub ini membahas *China National Petroleum Corporation* (CNPC). CNPC merupakan BUMN yang berdiri pada tanggal 17 september 1988 merupakan grup perusahaan minyak dan kimia terbesar di Tiongkok. CNPC berada dibawah naungan badan investasi dan komisi Negara untuk pengawasan aset negara dan administrasi (SASAC).41 Pada tanggal 27 Juli 1998, CNPC direorganisasi menjadi kelompok yang terintegrasi dengan bisnis yang meliputi minyak dan gas dengan melakukan operasi dari hulu ke hilir serta layanan ladang minyak dan rekayasa konstruksi. Peran CNPC tidak terlepas dari peran pemerintah yang menentukan arah kebijakan CNPC secara internal.

Semenjak dibentuk CNPC tidak hanya sebagai perusahaan nasional minyak Tiongkok melainkan juga sebagai organisasi pemerintah. Hal ini dikarenakan presiden CNPC berada setara di setingkat menteri seperti yang telah diutarakan sebelumnya, CNPC didirikan untuk menggantikan ministry of petroleum industry. Selain itu, semua manajer CNPC juga ditunjuk langsung oleh pemerintah sehingga CNPC tidak benar-benar independen dari pemerintah. CNPC yang terintegrasi dengan bisnis dan operasi yang meliputi:

1. Minyak dan gas eksplorasi & produksi, penyulingan & bahan kimia, gas alam & pipa serta pemasaran & perdagangan.
2. Jasa ladang minyak di prospeksi geofisika, baik pengeboran, penebangan, dan operasi *down hole* (lubang bawah).
3. Konstruksi minyak dan rekayasa permukaan lapangan gas, kosntruksi pipa dan pemurnian & tanaman kimia.
4. Pembuatan fasilitas pengeboran dan pemulihan peralatan, barang tubular khusus dan peralatan listrik.
5. Jasa managemen modal, keuangan dan asuransi
6. Sumber daya minyak dan gas tidak konvensional seperti energi biomassa dan energi terbarukan lainnya (www.cnpc.com.cn/en/companyprofile/history diakses pada tanggal 13 Januari 2018).

4.2.1.2 Kebijakan *Go Out Policy*

Adanya ketidakamanan energi di Tiongkok sehingga memaksa Tiongkok untuk mengembangkan perencanaan atau strateginya dengan mengeluarkan kebijakan *Go Out Policy* . Kebijakan *Go Out Policy* dikeluarkan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendorong investasi Tiongkok keluar negeri. Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Go Out Policy* dengan tujuan untuk mendorong perusahaan minyak nasionalnya untuk mengikuti jejak perusahaan-perusahaan minyak internasional dalam rangka mendapatkan cadangan minyak serta untuk mendapatkan pendapatan dari sektor hulu (eksplorasi dan produksi). setelah terjalin kerjasama Tersebut, investasi Tiongkok melalui CNPC telah meningkat dan pada saai ini CNPC telah menjadi pemain utama dalam industri minyak Sudan dengan memiliki beberapa blok eksplorasi minyak Sudan. Seluruh tujuan investasi Tiongkok di negara-negara Afrika bertujuan untuk mendapatkan akses aman terhadap suplai energinya

4.2.1.1 Kebijakan *Good Neighbor or Peripheral Diplomacy*

Kebijakan *good and friendly neighbour diplomacy*. Kebijakan luar negeri Tiongkok ini dibentuk pada masa Hu Jintao. Pada masa Hu Jintao berbeda dengan masa Jiang Zemin, dimana Hu Jintao lebih menekankan kepada keseimbangan dan tindakan pragmatis. Prinsip-prinsip ini yang akan memandu kebijakan luar negeri Tiongkok di negara periphery seperti Sudan dengan saling menghormati kedaulatan dan integritas territorial, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri, kesetaraan dan saling menguntungkan, dan hidup berdampingan secara damai.

Kebijakan *good and friendly neighbour diplomacy* ditunjukkan Tiongkok pada saat setelah Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan.

4.2.2 Ketergantungan Suplai Minyak Tiongkok Dari Sudan

Ketergantungan Tiongkok dari Sudan dalam suplai minyak menjadi salah satu tujuan utama Tiongkok sendiri dan sangat penting dalam kerjasama antara negara. inti dari ketergantungan Tiongkok dari Sudan adalah dikarenakan Tiongkok membutuhkan energi minyak yang cukup besar untuk memenuhi syarat Tiongkok di dalam negerinya, dan hal yang penting bagi Tiongkok kepada Sudan itu mendekatkan hubungan atau diplomasi dari kedua negara ini. Tahun 2011-2014 Tiongkok memulai pengembangan-pengembangan perusahaan yang dinamai CNPC. Berbagai penggambaran itu merupakan bukti bahwa di tengah pertumbuhan ekonominya yang pesat, Tiongkok sesungguhnya mengalami ketergantungan tinggi terhadap sumber energi. Menyadari hal itu, Tiongkok telah berupaya mengatasinya dengan berburu sumber-sumber minyak dan gas di seluruh dunia (Ambali, 2004:54).

Strategi perburuan itu dijalankan melalui dua cara. Pertama, mendorong perusahaan-perusahaan energi minyak Tiongkok berinvestasi di ladang minyak dan gas luar negeri. Kedua, menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kapasitas energi besar untuk membangun jalur transmisi yang menghubungkan daratan Tiongkok dengan sumber-sumber energi di negara-negara itu (Yoshikazu, 2008:87).

4.2.2.1 Kebutuhan Energi Minyak Tiongkok Dalam Ketersediaan Pasokan Energi Minyak Tiongkok di Sudan

Semenjak tahun 1993 Tiongkok telah mengalami ketergantungan pada impor minyak mentah yang mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. Misalnya,Tiongkok mengimpor minyak mentah hanya 1% dari konsumsi minyak harian pada tahun 1993, sedangkan Tiongkok mulai mengimpor 48% dari konsumsi harian pada tahun 2004. Seperti yang telah dilansir pada situs resmi Kementerian Perdagangan Tiongkok, konsumsi minyak Tiongkok akan meningkat dari 346,6 juta ton pada 2006 menjadi 407 juta ton pada 2010. Kebutuhan minyak Tiongkok pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 563 juta ton atau membengkak menjadi 10,5 juta barel per hari. Menurut data akademi tersebut dalam laporannya menyebutkan pertumbuhan rata-rata permintaan minyak sekitar 4,5% (Sandikli, 2010:56).

Peningkatan konsumsi minyak Tiongkok dipicu oleh terjadinya peningkatan hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi minyak serta pertumbuhan pesat transportasi. Berdasarkan perhitungan *Asosiation Tiongkok of Automobile Manufactures* untuk perhitungan data awal bulan april tahun 2011 menunjukkan permintaan bensin di Tiongkok mencapai 2,7 mb/d atau meningkat sekitar 12% (Skrikandi, 2014:5).

Pada saat ini 45% dari populasi di Tiongkok terdapat 1,3 milliar jiwa yang tinggal di kota dan terdapat 25 kota yang jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Jumlah penduduk Tiongkok yang tinggal di kota-kota meningkat 1,4% per tahun, dan peningkatan ini akan mencapai 55% sampai 60% pada tahun 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Untuk mencapai keamanan energi, Tiongkok harus dapat menjaga ketersediaan energi yang cukup dan keamanan distribusinya. Untuk mengatasi permasalahan

ketidakamanan energinya, Tiongkok melakukan ekspansi ke negara-negara Afrika yang notabenenya negara yang memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi negerinya. Tiongkok telah menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional untuk mendapatkan persediaan energinya yang cukup ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik yaitu untuk melakukan ekspansi ke Sudan. Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Go Out Policy* dengan tujuan untuk mendorong perusahaan minyak nasionalnya untuk mengikuti jejak perusahaan-perusahaan minyak internasional dalam rangka mendapatkan cadangan minyak serta untuk mendapatkan pendapatan dari sektor hulu (eksplorasi dan produksi).

Dalam kebijakan *Go Out Policy* ini mengemukakan sedikit tentang isi kebijakanya dengan cara menggunakan strategi kebijakannya dan fungsinya sebagai perusahaan minyak energi Tiongkok yaitu meningkatkan sumber dengan berusaha untuk memaksimalkan dan disversifikasi sumber daya minyak dan gas, memastikan pengganti tertib cadangan, dan mempertahankan kepemimpinan dari bisnis CNPC dari hulu ke hilir.

Ketergantungan Sudan terhadap Tiongkok maupun sebaliknya Tiongkok merupakan ketergantukan kedua belah pihak yang sama-sama menguntungkan kepada kedua negara tersebut. Tiongkok dalam kepentingan ke Sudan yatu melihat bahwa Sudan merupakan pemasok minyak yang banyak atau dapat disebut dengan salah satu sumber minya yang terbesar di dunia, begitupun Suda melihat bahwa Tiongkok merupakan negara yang kaya ekonomi yang hampir bersaing dengan negara Amerika Serikat yang memberikan pelayanan, pembangunan dan infrastruktur serta pinjaman kepada Sudan sehinga Sudan tidak keterbatasan pendapatan. Selain itupun Tiongkok menudukung perdamaian di Sudan, dan disisi lain Tiongkok semakin meperkeruh kondisi di Sudan.

Dimana Peningkatan konsumsi minyak Tiongkok dipicu oleh terjadinya peningkatan hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi minyak serta pertumbuhan pesat transportasi. Berdasarkan perhitungan *Asosiation Tiongkok of Automobile Manufactures* untuk perhitungan data awal bulan april tahun 2011 menunjukkan permintaan bensin di Tiongkok mencapai 2,7 mb/d atau meningkat sekitar 12%. Peningkatan ini sejalan dengan penjualan mobil penumpang yang mengalami peningkatan. Menurut *Asosiation Tiongkok of Automobile Manufactures* menunjukkan untuk bulan keempat pertama tahun 2011, penjualan mobil penumpang mencapai 6,97 juta unit atau naik sekitar 8%. Berangkat dari hal ini permintaan minyak diesel juga mengalami peningkatan sekitar 3,6 milliarbarrel per hari (mb/d). Sektor transportasi telah menyumbang lebih dari 45% pada konsumsi minyak di tahun 2011.

5.2 Saran

Di adakan keamanan yang begitu ketat dengan membuat kebijakan dan perjanjian yang spesifik antara kedua negara sehingga miyak yang di eksplor ke Tiongkok maupun ke negara lain, dapat dengan teratur alur keluarnya pertahun sehinga dapat diketahui secara spesifik. . Bagi sudan sendiri dimana pemakaian minyak untuk di negaranya sendiri harus di perhatikan, sehingga tidak di timpa dengan kekuran minyak dinegaranya. Dengan adanya kebijakan kedua negara agar dapat mengetahui seberapa besar Tingkok mengandalkan dan membutuhkan minyak dari Sudan, salah satu negara didunia yang memiliki sumber energi minyak yang di butuhkan oleh negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak salah satunya yaitu Tiongkok. Sehingga mengghin dari kemerosotan sumber daya minyak Sudan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambarwati, dan Subarno, Wijatmadja. 2016. *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Malang Cita intrans.

Attila, Sandikli. 2010. *Tiongkok Growing Need Of Energy and Changing Balances*. Istanbul: Bilgesam.

Charles W.Kegley Jr., dan Gregory A. Raymond. 2010. *The Global Future* : *A brief introduction to world politics*. Boston: Wadsworth.

Darmayadi, Andrias, Dkk. 2015. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: ZAVARA.

Dugis, V. 2007. *Analyzing Foreign Policy*. Jakarta: Grasindo

Evan, S. Medeiros. 2009. *China's International Behavior*. RAND Project Air Force.

Lucas, NJD J.Ambali, E. Chang. M.S Forbes Ricarte, R. M Shresth. 2004. " *Energy Policies In Asia*: *A Comparative Study*". London: McGraw-Hill Book Company.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Pruitt, Dean. G & Rubin, Jeffrey. Z. 2004. *Teori Konflik Sosia*l.Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rudy, Teuku May. 2002. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*: *Isu, Konsep, Teori dan Pradigma*. Bandung: Refika Aditama.

Rozanov, Anatoliy. 2013. *The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia's Security Challenges*. Minsk: DCAF Regional Programme Series.

Jurnal

Chen, Shaofeng. 2010. *China's Self-Extrication from the Malacca Dilemma‖ and Implications.‖ International Journal of China Studies* 1 (1): 1-24.

Rujukan Elektronik

CNPC, Sudan dan kilang minyak (http://csr.cnpc.com.cn/csr/xhtml/PageAssets/CNPCinSudan.pdf Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

CNPC, 2009-2015. "*CNPC History*". (www.cnpc.com.cn/en/companyprofile/history diakses pada tanggal 13 Januari 2018).